

**EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAPORAN KINERJA
(Studi Penelitian Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**CAHYA QURATUL NABILLA
NIM. 07011382126187**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAPORAN KINERJA**
(Studi Penelitian: Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Diajukan Oleh :
CAHYA QURATUL NABILLA
NIM. 07011382126187

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 9 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAPORAN KINERJA (Studi Penelitian: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 19 Mei 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Martina, M. Si
Ketua



Drs. Mardianto, M. Si
Anggota



Riza Adelia Suryani, S. Sos., M. Si
Anggota



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Quratul Nabilla
NIM : 07011382126187
Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/FISIP

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi berjudul "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pelaporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang" ini adalah sebenar-benarnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
06311AMX287786912

Cahya Quratul Nabilla

NIM. 07011382126187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you never bleed, you never grow”

(Cahya Quratul Nabilla, 2025)

Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Saudara perempuanku dan seluruh keluarga besar
3. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 2021
4. Almamater kebanggaan, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem terintegrasi dalam pengembangan *e-government* di Indonesia sebagai pemenuhan tuntutan publik melalui perencanaan strategis, sistem penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan pelaporan kinerja serta berfungsi untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan melalui evaluasi dan efisiensi operasional pemerintahan, serta menjamin akuntabilitas fiskal dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB menunjukkan sebagian instansi pemerintah belum mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang diharapkan, dengan penilaian masih didominasi tingkat sedang hingga rendah. Lokasi penelitian ini di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SAKIP dalam pelaporan kinerja di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Fokus penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas menurut Martani dan Lubis (2007), yaitu mengidentifikasi faktor-faktor determinan efektivitas SAKIP dalam Pelaporan Kinerja melalui 3 (tiga) pendekatan utama yaitu, faktor sumber, faktor proses, dan faktor sasaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, serta penerapan SAKIP yang telah menunjukkan perbaikan dari segi efisiensi dan kualitas pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dinilai sudah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi signifikan, namun masih memerlukan berbagai penguatan, khususnya pada aspek sumber daya, integrasi proses, dan kesesuaian indikator kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang akuntabel.

Kata Kunci: SAKIP, Pelaporan Kinerja, Akuntabilitas

ABSTRACT

The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is an integrated system in the development of e-government in Indonesia as a fulfillment of public demands through strategic planning, budgeting systems, government accounting, and performance reporting and serves to measure the success or failure of the implementation of programs and activities through evaluation and efficiency of government operations, as well as ensuring fiscal accountability and transparency in budget use. Based on the SAKIP evaluation report published by the Ministry of PAN-RB, it shows that some government agencies have not yet reached the expected level of performance accountability, with the assessment still dominated by moderate to low levels. The location of this research is in the Planning and Finance Section of the Palembang City Regional Secretariat. The research method was carried out through a descriptive qualitative approach. This research aims to analyze the effectiveness of SAKIP implementation in performance reporting at the Palembang City Regional Secretariat. The focus of this research is in line with the theory of effectiveness according to Martani and Lubis (2007), namely identifying the determinants of the effectiveness of SAKIP in Performance Reporting through 3 (three) main approaches, namely, source factors, process factors, and target factors, as well as the obstacles faced in its implementation. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of SAKIP in the Palembang City Regional Secretariat has shown positive results, marked by an increase in performance achievements and efficiency of budget use, as well as the implementation of SAKIP which has shown improvements in terms of efficiency and quality of reporting. These findings indicate that the effectiveness of SAKIP in the Palembang City Regional Secretariat can be assessed as running effectively, on target, and contributing significantly, but still requires various strengthening, especially in the aspects of resources, process integration, and suitability of performance indicators to improve the quality of accountable reporting.

Keywords: SAKIP, Performance Reporting, Accountability

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan Kehendak-Nya pula penulis diberikan kemudahan dan kelancaran selama menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pelaporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang”. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih sebesar-besarnya atas berkah dan rahmat Allah SWT yang selalu menjadi tempat penulis mengadu segala keluhan, kesah, dan syukur, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi serta meraih keberhasilan.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Sarnisah Achmiranda, selaku sosok yang tidak pernah lelah dalam bekerja keras dan doanya yang selalu menyertaiku.
3. Kedua adikku, Cahya Zahratul Yasfi dan Cahya Ilmazatul Isra' yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi keberhasilanku.
4. Prof. Dr. Alfitri, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Martina, M. Si. selaku Dosen Pembimbing magang sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan informasi terbaik bagi Mahasiswa/i bimbingannya.
7. Staff administrasi FISIP Universitas Sriwijaya, terkhusus Ibu Rafflesia Adesty selaku staf administrasi Jurusan Administrasi Publik
8. Bapak Jimmy Alamsyah Putra, S. Si selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
9. Ibu Nessia Febri Tarisha, S.E selaku Kepala Sub-bagian Perencanaan Bagian dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang

10. Seluruh pegawai dan staf Sekretariat Daerah Kota Palembang, terkhusus Bagian Perencanaan dan Keuangan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada penulis untuk melakukan magang serta penelitian, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Sekretariat Daerah Kota Palembang, serta secara khusus berkaitan dengan Jurusan yang sangat saya cintai, Administrasi Publik.

Palembang, Mei 2025

Cahya Quratul Nabilla
NIM. 07011382126187

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 Manajemen Publik.....	13
2.3 Pengertian Efektivitas.....	13
2.3.1 Ukuran Efektivitas.....	15
2.3.2 Pendekatan Efektivitas.....	16
2.4 Teori Akuntabilitas.....	18
2.4.1 Dimensi Akuntabilitas.....	19
2.4.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	20
2.4.3 Akuntabilitas Kinerja.....	21
2.4.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	22

2.5 Teori Kinerja.....	23
2.5.1 Indikator Kinerja.....	24
2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	25
2.5.3 Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
2.6 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	26
2.6.1 Komponen Utama SAKIP.....	27
2.6.2 Tujuan dan Manfaat SAKIP.....	28
2.7 Pengertian Determinan.....	29
2.7.1 Determinan Efektivitas.....	30
2.7.2 Faktor Sumber.....	30
2.7.3 Faktor Proses.....	31
2.7.4 Faktor Sasaran.....	32
2.8 Pengertian Pelaporan.....	32
2.8.1 Pelaporan Kinerja.....	33
2.8.2 Tujuan dan Fungsi Pelaporan Kinerja.....	34
2.9 Pemilihan Teori dalam Penelitian.....	35
2.10 Penelitian Terdahulu.....	36
2.11 Kerangka Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Variabel Penelitian.....	44
3.2.1 Definisi Konseptual.....	44
3.2.2 Fokus Penelitian.....	46
3.3 Unit Analisis Data.....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.5 Penentuan Informan (<i>Key Informan</i>).....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Teknik Analisis Data.....	50
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	53
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Palembang.....	53
4.1.2 Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	53

4.1.3 Logo Pemerintah Kota Palembang.....	54
4.1.4 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	56
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	57
4.1.6 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	58
4.1.7 Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	60
4.2 Deskripsi Responden/Informan Penelitian.....	63
4.3 Hasil Penelitian.....	63
4.3.1 Efektivitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pelaporan Kinerja.....	63
4.3.2 Capaian dan Keselarasan Komponen SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	66
4.4 Pembahasan.....	73
4.4.1 Efektivitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pelaporan Kinerja.....	73
4.4.2 Faktor Sumber (<i>Input</i>).....	74
4.4.3 Faktor Proses.....	77
4.4.4 Faktor Sasaran (<i>Output</i>).....	80
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kategori Predikat SAKIP.....	4
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	5
3. Penelitian Terdahulu.....	36
4. Fokus Penelitian.....	47
5. <i>Key Informan</i>	48
6. Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang 2022-2024.....	68
7. Matriks Hasil Wawancara.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan SAKIP.....	2
2. Kerangka Berpikir.....	43
3. Teknik Analisis Data.....	50
4. Tampak Depan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	54
5. Logo Pemerintah Kota Palembang.....	54
6. Bagan Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	60
7. Dokumen LKjIP 2022-2024.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	92
2. Matriks Wawancara Transkrip.....	95
3. Dokumentasi Wawancara.....	102
4. Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	104
5. Dokumen Pendukung Penelitian.....	105
6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	109
7. Surat Izin Penelitian.....	111
8. Surat Balasan Instansi.....	112
9. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	113
10. Kartu Bimbingan Skripsi.....	114
11. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	115

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPA/DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKjIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PK	: Perjanjian Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I

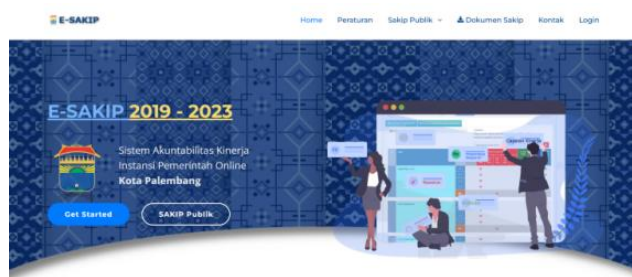
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era tata kelola pemerintah yang baik, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk bekerja dengan kecepatan dan ketepatan. Tujuan dari setiap instansi pemerintah di Indonesia adalah untuk mengimplementasikan inisiatif pembangunan yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas, untuk memfasilitasi hal ini, instansi pemerintah membutuhkan alat canggih untuk mempercepat proses kinerja mereka, yang seringkali dicapai melalui digitalisasi. Digitalisasi merupakan pendekatan inovatif dari pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun sistem atau aplikasi seperti situs web (Khirdany & Anas, 2024). Tujuan dari situs web ini adalah untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan dan evaluasi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Pembentukan situs web ini merupakan wujud nyata dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-government*. *E-government* memberikan peluang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai sebuah pembaharuan dasar reformasi dalam sistem pemerintahan, reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas kinerja dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu inovasi dari pengembangan *e-government* yang diberlakukan sebagai bagian dari

reformasi birokrasi. Sesuai dengan konsep akuntabilitas keuangan, sistem ini menggabungkan sejumlah komponen yang berintegrasi, termasuk sistem perencanaan strategis, penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan pelaporan kinerja (Pasinringi, 2010). Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai *outputnya*, dengan menilai tingkat pencapaian kinerja, pendekatan ini menentukan keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan, kemudian hasilnya digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang.



Gambar 1. Tampilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sumber: official website SAKIP Kota Palembang

Pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas dan melakukan evaluasi kinerja yang efektif untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bagaimana pemerintah mencapai hal tersebut melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, adalah rangkaian tindakan, instrumen, dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Setiap institusi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban ini dalam rangka memberikan informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan program yang telah dilaksanakan.

Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai unsur lembaga pemerintah daerah mempunyai tugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan pemerintah daerah, membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai fungsi dan kewenangannya. Dalam struktur Sekretariat Daerah terdapat bagian perencanaan dan keuangan yang turut bertanggung jawab juga dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bagian ini bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung proses pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan dirancang untuk menilai serta melaporkan tingkat efektivitas dan efisiensi operasional pemerintahan, guna menjamin akuntabilitas fiskal dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu program prioritas pemerintah, di mana hal ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi. Selain itu, akuntabilitas kinerja juga tercantum sebagai subindikator dalam sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Akuntabilitas kinerja berperan

penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang perlu diketahui publik. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perencanaan berfokus pada tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu instrumen untuk mengelola nilai-nilai akuntabilitas dan keterbukaan ini adalah melalui penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat terus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat guna membentuk masyarakat yang terinformasi dan mampu memberikan saran maupun masukan terhadap kinerja pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif, data yang disampaikan juga perlu disertai dengan bentuk pertanggungjawaban. Adapun komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, serta evaluasi kinerja 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 12 Tahun 2015. Selain itu, aspek prestasi kinerja juga diperhitungkan dengan bobot penilaian sebesar 20%.

KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 1. Kategori Predikat SAKIP

Sumber: Kementerian PAN-RB (2021)

Laporan evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjelaskan bahwa

masih banyak instansi pemerintah yang belum mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang dari tahun 2022-2024, kategori penilaian indikator kinerjanya berada pada predikat “BB (Sangat Baik)”, unit utama yang didominasi oleh tingkat sedang hingga rendah dengan skor 70-80 dari segi efektivitas dan efisiensinya. Namun belum mampu memperoleh predikat “AA (Sangat Memuaskan)” atau predikat “A (Memuaskan)” yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dengan skor unit utama dari 80-100.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama
1.	Perencanaan Kinerja	30.00	24.30	1.	Perencanaan Kinerja	30.00	21.00
2.	Pengukuran Kinerja	30.00	20.70	2.	Pengukuran Kinerja	30.00	21.00
3.	Pelaporan Kinerja	15.00	10.20	3.	Pelaporan Kinerja	15.00	10.35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25.00	23.75	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25.00	23.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78.95 (BB)	Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	74.85 (BB)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama
1.	Perencanaan Kinerja	30.00	23.20
2.	Pengukuran Kinerja	30.00	18.90
3.	Pelaporan Kinerja	15.00	10.50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25.00	23.15
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	75.75 (BB)

Tabel 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2022-2024

Penerapan SAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan pemerintah pusat secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kota Palembang.

Akuntabilitas merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintah yang baik dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala. Media tersebut

sangat penting untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil program tersebut mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaporan dan menciptakan transparansi, pemerintah merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta tinjauan dan evaluasi kinerja.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil yang dihasilkan mampu menjawab atau mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan operasionalnya berhasil mewujudkan hasil akhir sesuai dengan arah kebijakan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan dan target, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam proses pencapaiannya. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas daerah dianalisis melalui indikator pendekatan kriteria efektivitas menurut (Martani & Lubis, 2007) yang menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber daya, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Selain menilai efektivitas berdasarkan pendekatan, efektivitas pelaksanaan SAKIP juga dipengaruhi oleh sejumlah determinan yang saling berkaitan. Determinan efektivitas merujuk pada faktor-faktor kunci yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi sistem. Beberapa determinan yang relevan antara lain adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), dukungan teknologi informasi, ketersediaan anggaran, serta organisasi yang mendukung akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam menganalisis

efektivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya *output* dan *outcome* yang dicapai, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh.

Transparansi adalah salah satu indikator utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. Bentuk nyata adanya pemerintahan yang baik meliputi keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Indikator ini mengharuskan adanya sistem informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan kondisi keuangan serta pengelolaan organisasi. Dengan adanya indikator ini, maka akan terbentuk hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Besarnya bobot pada komponen perencanaan kinerja disebabkan oleh peran pentingnya tahapan awal manajemen kinerja SAKIP. Perencanaan kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem ini, karena mencakup penyusunan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Setiap tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator keberhasilan yang akan digunakan dalam proses pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Selanjutnya, perencanaan kinerja juga harus mencakup proses *cascading*, yaitu penurunan dan penyelarasan kinerja hingga ke unit organisasi paling bawah, agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi organisasi.

Komponen pelaporan kinerja juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan SAKIP. Pelaporan kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang tercantum di dalam dokumen perencanaan kinerja. Untuk mengendalikan proses pencapaian kinerja maka pelaporan kinerja dilaksanakan

secara berkala (bulanan/triwulan/semester). Selain itu, pelaporan kinerja diharapkan juga dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pimpinan hingga pelaksana, serta hasil pelaporan tersebut dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja.

Penelitian sebelumnya antara lain (Stephani *et al.*, 2024) “*Analisis Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Perwakilan BPKP provinsi Sumatera Barat*” dengan metode penelitian bersifat kualitatif. (Nani *et al.*, 2021) “*Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur*” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Br *et al.*, 2022) “*Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo*” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Jauhari *et al.*, 2024) “*Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung Guna Mewujudkan Good Governance*” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Apriani, 2024) “*Efektivitas Pelatihan ASN terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Kaimana*” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian terkait meningkatkan akuntabilitas (Setiawan *et al.*, 2024) “*Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya*” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Mukaromah & Priyono, 2021) “*Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang*” dengan menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pertanian dan Pangan seluruhnya sudah berjalan dengan baik. Penelitian lainnya dalam implementasi SAKIP yaitu (Stefan *et al.*, 2023)

“Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur” dengan menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif.

Penelitian lainnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja yaitu (Sa & Hermawan, n.d., 2024) *“Efektivitas Penggunaan Aplikasi E SAKIP Dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya”* dengan menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif. (Hasman & Supriaddin, 2023) *“Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Bombana”* dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada pengelolaan internal tanpa membahas secara spesifik aspek pelaporan kinerja, padahal pelaporan kinerja yang optimal adalah salah satu indikator penting keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi, di mana tujuannya ialah memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Mengkaji efektivitas ini diharapkan dapat membantu serta memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan dan keberhasilan pencapaian tujuan secara keseluruhan, serta dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan SAKIP serta memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan pengaruhnya terhadap kinerja akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan instansi pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan efektivitas pelaporan kinerja melalui sistem akuntabilitas yang diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “apa saja determinan efektivitas SAKIP dalam pelaporan kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang”?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui determinan efektivitas SAKIP dalam pelaporan kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang konsep akuntabilitas dalam konteks pemerintahan, serta bagaimana akuntabilitas dapat diukur dan diterapkan
2. Memperoleh kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh civitas akademika jurusan Ilmu Administrasi Publik serta untuk mengetahui kebijakan publik dengan memasukkan elemen akuntabilitas kinerja sebagai faktor penting dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memperoleh cara-cara penyusunan rencana kerja yang lebih baik, monitoring dan evaluasi, penyelesaian masalah, serta kolaborasi antardivisi untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju

tujuan yang sama di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

2. Tumbuhnya penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, sumber daya yang lebih efisien, sehingga Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat mencapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonom*. Jakarta: Taushia.
- Lubis, H. S. . dan M. H. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Andi.
- Martani dan Lubis, 2007. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet

- Br, A. M. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi ...*, 3. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8628%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/8628/5282>. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 01.15 p.m.
- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 93–103. <https://doi.org/10.28932/jam.v9i2.469>. Diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 01.45 p.m.
- Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. *The New Public Service, M.E. Sharpe, New York. Journal The New Public Service*. <https://doi.org/10.4324/9781315709765> Diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 01.45 p.m.

- Ding, D. (2014). Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. *E-Journal Ilmu Pemerintah*, 2(2), 2888–2902. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024, pukul 09.05 a.m.
- Kartika, R., Prabowo, F. H. E., & Akbar, D. S. (2020). Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25157/je.v8i1.3341>. Diakses pada tanggal 20 November 2024, pada pukul 03.21 p.m.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 102–111. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1738>. Diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 02.01 p.m.
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78–95. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i1.2126>. Diakses pada tanggal 2 November 2024, pukul 09.07 a.m.
- Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Pelaporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/produk-hukum>. Diakses pada tanggal 8 November 2024, pukul 10.17 p.m.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>. Diakses pada tanggal 8 November 2024, pukul 10.07 p.m.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau disebut dengan *electronic government*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>. Diakses pada tanggal 8 November 2024, pukul 02.16 p.m.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021>. Diakses pada tanggal 17 November 2024, pukul 09.09 p.m.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142822/perwali-kota-palembang-no-1-tahun-2020>. Diakses pada tanggal 17 November 2024, pukul 09.56 p.m.
- Prameswari, Fathia Andina, Kartika Rachma Sari, S. (2024). Determinan

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. 357–371. <https://paperity.org/p/358093652/determinan-akuntabilitas-kinerja-organisasi-perangkat-daerah-kota-palembang>. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Diakses pada tanggal 4 November 2024, pukul 03.05 p.m.

Putri, S. D., Periansya, P., & Sari, Y. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2305-2320. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/5220>. Diakses pada tanggal 4 November 2024, pukul 10.10 a.m.

Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106-113. *Jurnal Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/67>. Diakses pada tanggal 5 November 2024, pukul 04.01 p.m.

Townsend, K., Cafferkey, K., McDermott, A. M., & Dundon, T. (Eds.). (2019). *Elgar introduction to theories of human resources and employment relations. Journal Theories of Human Resources and Employment Relations*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4337/9781786439017>. Diakses pada tanggal 13 November 2024, pukul 07.10 p.m.